

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang peneliti temukan berdasarkan paparan data dan penelitian kemudian dilanjutkan pada pokok bahasan pembahasan maka peneliti menemukan beberapa kesimpulan berikut :

Pertama, Kepemimpinan partai politik islam di Kabupaten Lamongan mempunyai karakter yang agak berdebeda satu sama lainnya. Hal ini bisa dilihat dari model interaksi partai politik islam yang sudah peneliti lakukan penelitian. PKB mempunyai karakter kepemimpinan *Clientilistic* yang berarti mempunyai kecenderungan untuk melakukan pertukaran sumber daya maksudnya bahwa kepemimpinan di partai politik tersebut lebih bersifat transaksional, mereka lebih mendepankan politik kekuasaan dalam ranah untuk bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. PAN punya karakter kepemimpinan dengan model interaksi *Clientilistic* yang hampir sama dengan PKB. Sedangkan PKS mempunyai karakter atau model interkasi kepemimpinan Personal Karismatik, yang lebih menonjolkan popularitas kepemimpinan partai mereka hanya saja karena menggunakan pendekatan tersebut akhirnya PKS Kabupaten Lamongan tidak mampu mendapatkan satu kursi pun pada Pileg tahun 2019. Mereka menjadi korban adanya isu wahabi yang dialamatkan kepada partai tersebut. Sedangkang PPP lebih menggunakan pendekatan Rasional Pragmatis dengan selalu mendergarkan aspirasi rakyat atau konstituen unutk kebijakan yang akan mereka ambil. Hanya saja ketika berhadapan dengan moment pemilu atau politik praktis mereka, keempat partai politik islam tersebut cenderung menggunakan cara politik transaksional.

Kedua, Kontestasi yang terjadi antar partai politik islam yang ada di Kabupaten Lamongan cenderung menggunakan pendekatan politik pragmatis dan transaksional. Hal tersebut diakui oleh hampir semua petinggi partai yang peneliti temui. Mereka menyatakan bahwa politik transaksional memang sudah menjadi keadaan demokrasi hari ini, sulit untuk dihindari. Belum lagi masyarakat di Kabupaten Lamongan juga punya pola pikir pragmatis, dengan sederhana muncul istilah NPWP (*nomor piro wani piro*), maksudnya bahwa setiap caleg harus punya dana yang besar untuk bisa merebut simpati para pemilih mereka, nomor berapa berani berapa? Itulah kondisi kontestasi yang terjadi antar partai politik islam di Kabupaten Lamongan, sehingga dalam konteks ini demokrasi menjadi ajang pelaksanaan politik kekuasaan apapun dan bagaimanapun caranya. Sehingga partai politik islam yang peneliti jelaskan sebelumnya lebih menggunakan ideologi kekuasaan sebagai basis utama mereka untuk berpolitik. Ketika kekuasaan dijadikan pedoman berpolitik maka ciri-ciri atau karakter nilai islam tidak ditemukan di partai politik islam tersebut.

B. Implikasi Teoritis/ Praktis

Hasil penelitian dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa partai-partai politik islam tersebut cenderung tidak memakai asas atau nilai-nilai islam dalam aktifitas politik mereka. Namun model interaksi kepemimpinan mampu untuk menjawab keadaan tersebut. PKB dan PAN lebih cenderung menggunakan model interaksi *Clientilistic* dengan pedoman bahwa ada suatu pertukaran antara politisi dengan pemilih, yakni politik transaksional. PKS lebih identik dengan pendekatan model personal karismatik, popularitas pemimpin mereka dijadikan suatu nilai positif untuk mengangkat nama partai, namun karena hal tersebut mereka terkena isu wahabi, beberapa masyarakat Kabupaten Lamongan menyebutkan bahwa PKS adalah wahabi, hal ini juga dikuatkan oleh pimpinan partai mereka yang menyakatkan bahwa PKS di Kabupaten Lamongan terkena isu tersebut.

PPP lebih menggunakan rasional pragmatis dalam menjalankan roda organisasi, mereka sering mendengarkan aspirasi rakyat untuk dijadikan pegangan guna membuat kebijakan. Namun dari semua partai politik islam tersebut menggunakan pendekatan politik pragmatis dan transaksional apabila moment pemilu berlangsung. Maka secara teoritis partai-partai politik islam tersebut punya model interkasi yang berbeda, namun semua satu tujuan yakni kekuasaan apabila dihadapkan dengan moment pemilu.

C. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan yang menjadi salah satu factor penelitian ini jauh dari kata sempurna antara lain yakni,

Pertama, adalah peneliti hanya focus pada persoalan isu-isu demokrasi modern dan kepemimpinan sebagai akibat demokratisasi yang terjadi dan terus berkembang saat ini. Sehingga mungkin kurang melihat aspek lainnya semisal ekonomi, hukum, budaya, agama dan pendidikan yang juga punya pengaruh signifikan.

Kedua, Mungkin peneliti juga kurang dalam jumlah responden atau informan yang peneliti temui untuk dilakukan wawancara, dengan kata lain terkadang mereka punya kesibukan yang luar biasa sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara. Beberapa kali peneliti lakukan komunikasi untuk penjadwalan pertemuan namun beberapa kali juga terjadi pemabatalan sehingga proses wawancara tertunda bahkan batal. Hal tersebut juga karena waktu yang peneliti punya tidak banyak dan harus dengan segera menyelesaikan penelitian ini.

Ketiga, mungkin ada keterbatasan teori atau konsep dan paragidma yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenomena dan isu-isu yang sedang peneliti teliti yakni persoalan kepemimpinan, demokrasi, politik transaksional. Peneliti rasa hal tersebut menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini, belum lagi persoalan refrensi yang mungkin kurang atau bahkan kurang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

D. Rekomendasi

Tentu penelitian yang peneliti lakukan jauh dari sempurna, maka apabila ada yang akan melanjutkan penelitian ini dengan tema yang hampir sama, harapan peneliti harus dipersiapkan data-data yang lebih komplit dan kompleks. Sehingga akan menghasilkan penelitian yang komprehensif dan metodologis. Peneliti punya rekomendasi bahwa seharusnya kita bisa melaksanakan demokrasi secara baik dan bernilai luhur. Hanya saja karena persoalan politik yang memerlukan biaya tinggi akhirnya malah memunculkan isu politik transaksional yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sistematis dan massif. Harus ada gerakan *civil society* atau bahkan *people power* untuk mengatasi hal tersebut. Bagi para politisi atau anggota dewan atau bahkan pihak eksekutif harus mulai meninggalkan konsep pemikiran politik pragmatistis dan transaksional karena hal tersebut akan sangat merugikan bangsa dan negara secara umum.

Pemerintah juga harus punya formulasi khusus agar dan supaya politik transaksional menjadi berkurang atau bahkan hilang dari negeri ini, walaupun hal tersebut adalah sulit namun masih bisa diusahakan. Anggota dewan juga sudah harus berpikir untuk segera membuat aturan mengenai politik transaksional baiknya dipikir dengan seksama agar fenomena tersebut bisa berkurang. Dan untuk masyarakat khususnya warga Kabupaten Lamongan sudah harus dengan segera meninggalkan pola pikir yang pragmatistis dalam politik sehingga politik transaksional yang terjadi saat ini bisa diselesaikan secara bijaksana.